

Effectiveness of Using the E-SAKIP Application in Monitoring and Evaluating Performance in the Surabaya High Religious Court Environment **[Efektivitas Penggunaan Aplikasi E SAKIP Dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya]**

Nur Sa'adah Muhammad¹⁾, Sigit Hermawan²⁾

¹⁾Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: sigithermawan@umsida.ac.id

Abstract: *Accountability and transparency are essential requirements for public institutions to gain public trust, which can be achieved through the implementation of e-government initiatives such as the electronic Government Agency Performance Accountability System (e-SAKIP). Although e-SAKIP aims to facilitate the monitoring, evaluation, and reporting of government agency performance, its implementation still faces several technical and human resource challenges that need to be addressed to achieve optimal effectiveness. This research aims to analyze the causes of ineffectiveness and inhibiting factors in the use of the e-SAKIP application, as well as examine efforts to improve its effectiveness in monitoring and evaluating performance at the Surabaya Religious High Court. This study uses a descriptive qualitative method with primary data from structured and in-depth interviews with informants selected through purposive sampling, as well as secondary data from related documents. Data analysis uses thematic analysis techniques with source and method triangulation to enhance validity. The research results at the Surabaya Religious High Court show that the implementation of the e-SAKIP application faces various challenges that hinder its effectiveness. The main issues include feature incompatibility, technical and infrastructure constraints, lack of training, data accuracy problems, coordination difficulties, increased workload, and concerns related to system transparency and sustainability. To address these issues, comprehensive efforts are needed, including feature adjustments, infrastructure improvements, continuous training, enhancing data accuracy, optimizing coordination and workload, and implementing effective change management. The implementation of these measures is expected to improve the effectiveness of e-SAKIP in enhancing overall institutional performance.*

Keywords: Accountability, e-SAKIP, Effectiveness, Monitoring, Qualitative.

Abstrak: Akuntabilitas dan transparansi merupakan syarat penting bagi instansi publik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui penerapan e-government seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) elektronik (e-SAKIP). Meskipun e-SAKIP bertujuan untuk memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala teknis dan sumber daya manusia yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakefektifan dan faktor penghambat penggunaan aplikasi e-SAKIP, serta mengkaji upaya peningkatan efektivitasnya dalam monitoring dan evaluasi kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara terstruktur dan mendalam kepada informan yang dipilih melalui purposive sampling, serta data sekunder dari dokumen terkait. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik dengan triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menunjukkan bahwa implementasi aplikasi e-SAKIP menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Masalah utama meliputi ketidaksesuaian fitur, kendala teknis dan infrastruktur, kurangnya pelatihan, masalah akurasi data, kesulitan koordinasi, peningkatan beban kerja, serta kekhawatiran terkait transparansi dan keberlanjutan sistem. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya komprehensif yang mencakup penyesuaian fitur, perbaikan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, peningkatan akurasi data, optimalisasi koordinasi dan beban kerja, serta penerapan manajemen perubahan yang efektif. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas e-SAKIP dalam memperbaiki kinerja institusi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, e-SAKIP, Efektivitas, Monitoring, Kualitatif.

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi adalah suatu persyaratan bagi instansi bagian publik agar bisa dipercayai secara luas oleh masyarakat, melalui penggunaan teknologi informasi yang terpenuhi dengan diterapkannya electronic

government dimana penerapan e-government ini adalah suatu wujud keterbukaan atau transparansi pemerintah terhadap public [1]. Untuk itulah setiap instansi pemerintah harus dapat melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara benar, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, sampai evaluasi kinerja.

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Melihat tuntutan mengenai akurasi dan fleksibilitas, maka diperlukan fasilitas yang dapat memudahkan tugas-tugas pimpinan, khususnya dalam bidang perencanaan program dan anggaran dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama dalam urusan pengolahan data, monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Pasal 2 Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Monitoring dan evaluasi menjadi hal yang penting apabila melihat dari tujuan yang ada dalam peraturan tersebut, dan juga hal ini bisa menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan pada periode berikutnya agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk mempermudah pelaksanaannya maka pada level pemerintahan pusat, Mahkamah Agung berinovasi dengan membangun sebuah aplikasi yang bernama e-SAKIP (aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik) yang bertujuan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi dan pelaporan [2].

Aplikasi e-Sakip dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis website dan online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dalam waktu yang tergolong singkat untuk laporan yang bersifat kompleks dan rumit tersebut apabila dilaksanakan dengan manual tanpa menggunakan inovasi teknologi maka mengolah data akan lama dan memungkinkan terjadi banyak kesalahan (human error) dalam proses pengolahan data [3]. Selama diimplementasikan, aplikasi e-SAKIP terus dikoreksi dan disempurnakan. Penyempurnaan dilakukan supaya data yang dihasilkan lebih akurat dan membantu Mahkamah Agung dalam memantau capaian kinerja masing-masing satuan kerja. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah salah satu satuan kerja yang telah menerapkan aplikasi e-SAKIP dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Banding di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) Pengadilan Agama se Jawa Timur. Pelaksanaan fungsi pengawasan salah satunya adalah melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja [4].

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja merupakan tugas dan fungsi sub bagian perencanaan program dan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan dilaksanakan setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. Dalam realisasinya, ternyata masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi ini. Permasalahan ini adalah hasil laporan dari e-SAKIP tidak menampilkan seluruh data yang sudah diinput pada aplikasi dan hasil dari capaian seluruh indikator tidak bisa terjumlah secara otomatis sehingga harus diubah secara manual. Selain itu belum terdapat menu untuk menambahkan indikator kinerja selain yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Permasalahan lainnya adalah masih banyak kesalahan dalam penginputan data pada aplikasi tersebut. Melihat permasalahan yang ada, maka dapat dilihat bahwa efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya tercapai dengan permasalahan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal.

Penelitian terkait dengan permasalahan yang ada di e-SAKIP pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Febiani, Irianto dan Purwanti memaparkan bahwa bahwa komitmen satuan kerja dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas SAKIP, sedangkan dukungan pemerintah pusat dan pedoman evaluasi implementasi SAKIP tidak berpengaruh terhadap efektivitas SAKIP [5]. Selain itu, penelitian oleh Gitasih, Sumada dan Astawa mengemukakan bahwa penerapan aplikasi e-SAKIP mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah di

Pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan penelitian ini, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan penggunaan aplikasi secara aktif [6].

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji efektivitas SAKIP dan pengaruh penerapan e-SAKIP terhadap kinerja perangkat daerah, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam konteks spesifik monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Penelitian yang ada belum secara khusus membahas kendala-kendala teknis dalam penggunaan aplikasi e-SAKIP seperti yang dialami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, termasuk masalah tampilan data, perhitungan otomatis, keterbatasan menu, dan kesalahan input data. Selain itu, belum ada penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam konteks penggunaan e-SAKIP di lingkungan peradilan agama. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul *Efektivitas Penggunaan Aplikasi E SAKIP Dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Apa penyebab tidak efektifnya penggunaan aplikasi e SAKIP dan faktor penghambatnya?
- 2) Bagaimana upaya peningkatan efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya?

TUJUAN PENELITIAN

Sedangkan untuk tujuan dari diadakannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab tidak efektifnya penggunaan aplikasi e SAKIP dan faktor penghambatnya.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya peningkatan efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

KATEGORI SDGS: Penelitian ini berkaitan dengan tujuan SDGs nomor 16, yaitu "Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (peace, justice, and strong institution)". Tujuan ini menekankan pentingnya membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di segala lapisan untuk pembangunan berkelanjutan. Penggunaan aplikasi E-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan langkah konkret menuju penguatan kelembagaan peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, institusi peradilan berupaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam mengelola kerjanya. Hal ini sejalan dengan semangat SDGs nomor 16 yang mendorong terciptanya lembaga-lembaga yang kuat dan transparan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

II. LITERATUR REVIEW

A. Pengertian dan Ukuran Efektivitas

Konsep efektivitas, sebagaimana diuraikan oleh Siagian, merujuk pada optimalisasi penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas tidak hanya berbicara tentang kuantitas output, tetapi juga kualitas dan ketepatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan [7]. Dalam konteks ini, efektivitas menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam memenuhi sasaran yang telah direncanakan. Lebih lanjut, efektivitas dapat dipahami sebagai rasio antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Semakin dekat hasil aktual dengan target yang ditetapkan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat dalam setiap

kegiatan. Efektivitas bukan hanya tentang pencapaian tujuan, tetapi juga tentang bagaimana tujuan tersebut dicapai dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.[8]

Dalam implementasinya, efektivitas menuntut adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menghasilkan output yang sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi [9]. Ini menyiratkan bahwa efektivitas tidak hanya terkait dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses pencapaiannya. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas suatu kegiatan atau program, perlu diperhatikan tidak hanya outputnya, tetapi juga efisiensi penggunaan sumber daya dan ketepatan dalam pelaksanaannya.

B. Konsep Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan komponen integral dalam manajemen dan pengawasan kinerja organisasi. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan dalam Webster's New Collegiate Dictionary, merujuk pada suatu mekanisme atau alat yang digunakan untuk mengamati, memberi saran, atau memperingatkan [10]. Dalam konteks organisasi, monitoring berfungsi sebagai sistem pengawasan yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan program atau kegiatan yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, Suherman dan rekan-rekannya memperluas pemahaman tentang monitoring dengan menekankan aspek kontinuitas dan keteraturannya. Mereka mendefinisikan monitoring sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur untuk mengikuti perkembangan suatu program [11]. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, bukan hanya sebagai kegiatan sporadis atau sewaktu-waktu. Evaluasi merupakan komponen krusial dalam proses pengawasan dan peningkatan kualitas kinerja. Ini mencakup serangkaian tahapan sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai bukti yang relevan. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan nilai dari berbagai intervensi atau program yang diterapkan dalam suatu organisasi [12].

Monitoring dan evaluasi memainkan peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan performa atau kinerja pegawai. Melalui proses ini, organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, mengukur pencapaian target, dan menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyelewengan tugas atau wewenang yang mungkin terjadi dalam lingkungan kerja [13]. Dengan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mendorong peningkatan kinerja individu dan tim, tetapi juga membantu dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan [14]. Pada akhirnya, proses ini berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara lebih efisien dan efektif, sambil meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

C. Konsep Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memainkan peran krusial dalam mekanisme manajemen organisasi. Proses ini berfungsi sebagai instrumen vital untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan akuntabilitas [15]. Melalui pengukuran kinerja yang sistematis, organisasi dapat mengembangkan landasan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan-keputusan strategis. Proses ini memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan yang telah diambil, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Hasil dari pengukuran kinerja berperan sebagai umpan balik yang sangat berharga bagi organisasi. Informasi yang diperoleh dari proses ini memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian organisasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja juga membantu mengidentifikasi titik-titik kritis di mana organisasi perlu melakukan penyesuaian dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian [16].

Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat evaluasi yang memungkinkan manajemen untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas kinerja organisasi. Melalui proses ini, organisasi dapat mengidentifikasi kesenjangan antara hasil yang dicapai dan ekspektasi yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan [17]. Seiring dengan perkembangan paradigma New Public Management (NPM), konsep kinerja (performance) mulai mendapatkan perhatian yang signifikan dalam administrasi publik. Pergeseran dari Old Public Administration ke NPM telah membawa perubahan besar dalam cara pemerintah menjalankan fungsinya. Fokus utama kini bukan lagi sekadar mengarahkan (steering), tetapi lebih kepada mengayuh (rowing), yang berarti pemerintah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga aktif dalam implementasinya [18].

D. Teori Sistem Informasi Kinerja (Model Hot-Fit)

Teori Sistem Informasi Kinerja, khususnya Model HOT-Fit (Human-Organization-Technology Fit), adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami efektivitas sistem informasi dalam konteks organisasi. Model ini dikembangkan oleh Yusof et al. pada tahun 2006 sebagai pengembangan dari model sebelumnya seperti IS Success Model dan IT-Organization Fit Model [19]. Model HOT-Fit terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi: Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan Teknologi (Technology). Setiap komponen ini memiliki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesesuaian (fit) keseluruhan system [20].

Komponen Manusia dalam model HOT-Fit berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengguna sistem informasi. Ini mencakup penggunaan sistem (system use) dan kepuasan pengguna (user satisfaction). Penggunaan sistem mengacu pada frekuensi dan luasnya fungsi dan fitur sistem informasi yang dimanfaatkan oleh pengguna. Sementara itu, kepuasan pengguna berkaitan dengan sikap pengguna terhadap sistem informasi, termasuk persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Faktor-faktor seperti pengalaman pengguna, pelatihan, dan dukungan teknis juga masuk dalam komponen ini [21]. Komponen Organisasi mempertimbangkan aspek-aspek struktural dan lingkungan organisasi yang mempengaruhi implementasi sistem informasi. Ini meliputi struktur organisasi, strategi, budaya, manajemen, kepemimpinan, dan dukungan dari pihak manajemen. Struktur organisasi mencakup tipe, ukuran, dan hierarki organisasi. Lingkungan organisasi termasuk sumber pendanaan, pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan antar organisasi, dan komunikasi. Semua faktor ini berperan penting dalam menentukan bagaimana sistem informasi diimplementasikan dan digunakan dalam organisasi [22].

E. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan organisasi modern. MSDM mencakup serangkaian proses dan strategi yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien [23]. Salah satu komponen penting dalam MSDM adalah perencanaan sumber daya manusia. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan SDM yang baik memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, dan mengembangkan strategi untuk mengisi kesenjangan tersebut [24].

Rekrutmen dan seleksi merupakan fungsi vital dalam MSDM. Proses ini bertujuan untuk menarik dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen yang efektif melibatkan berbagai strategi, mulai dari pemasangan iklan lowongan kerja, pemanfaatan media sosial, hingga kerjasama dengan lembaga pendidikan. Sementara itu, proses seleksi melibatkan serangkaian tahapan seperti penyaringan resume, wawancara, tes kemampuan, dan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki kualifikasi dan kesesuaian budaya dengan organisasi [25]. Pengembangan dan pelatihan karyawan adalah aspek lain yang sangat penting dalam MSDM. Program pengembangan karyawan dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif terhadap organisasi [26]. Ini dapat mencakup pelatihan formal, mentoring, rotasi pekerjaan, dan program pengembangan kepemimpinan. Investasi dalam pengembangan karyawan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu dalam retensi karyawan dan menciptakan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan adaptif [27].

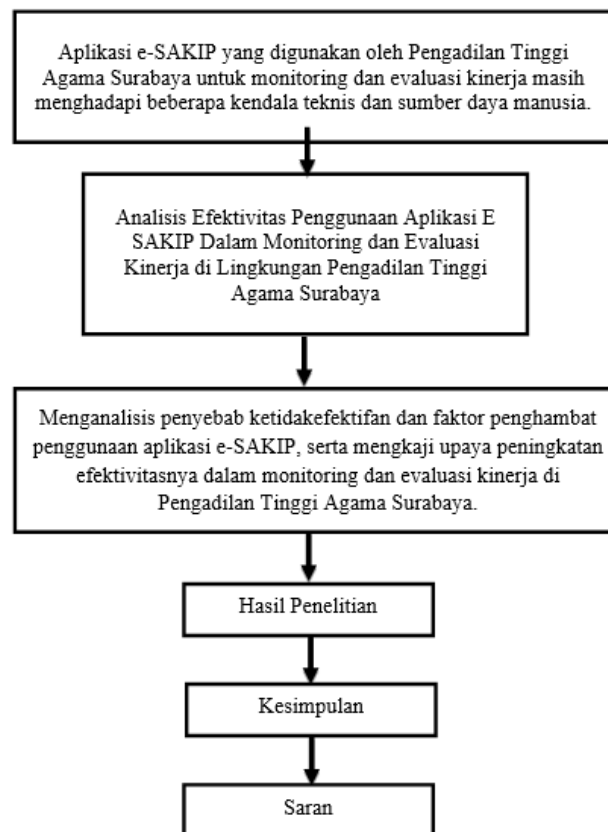
III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena penggunaan aplikasi E-SAKIP dalam konteks spesifik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian tersebut adalah 2 jenis data yakni primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung atau data yang diperoleh secara langsung dari wawancara kepada narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis dalam penelitian. Kegiatan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan jenis wawancara terstruktur dan mendalam untuk melihat tentang efektivitas penggunaan aplikasi e- SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. [28] Informan

yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Operator pelaksana penginput data aplikasi e-SAKIP dan Pengguna Manfaat aplikasi e-SAKIP (Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya).

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung saat proses penelitian, yaitu melalui dokumen-dokumen, buku, kepastakaan, dan keterangan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan data-data ini digunakan dalam penelitian sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer.[29] Adapun dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Analisis data akan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data akan dikoding, dikategorisasi, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas penggunaan aplikasi. Triangulasi sumber data dan metode akan diterapkan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.[30] Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas aplikasi E-SAKIP, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta potensi perbaikan dalam penggunaannya untuk monitoring dan evaluasi kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1 Kerangka Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penyebab Tidak Efektifnya Penggunaan Aplikasi e-SAKIP Dan Faktor Penghambatnya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terungkap beberapa penyebab utama ketidakefektifan penggunaan aplikasi e-SAKIP serta faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Berikut adalah temuan penelitian:

Salah satu penyebab utama ketidakefektifan penggunaan e-SAKIP adalah ketidaksesuaian antara fitur-fitur aplikasi dengan kebutuhan spesifik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mengungkapkan:

“Meskipun e-SAKIP memiliki banyak fitur, kami merasa ada beberapa aspek kunci dari proses monitoring dan evaluasi kinerja kami yang belum sepenuhnya terakomodasi. Ini membuat kami harus melakukan penyesuaian atau bahkan menggunakan sistem tambahan, yang tentu saja mengurangi efisiensi”.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun e-SAKIP dirancang sebagai solusi komprehensif, masih ada kesenjangan antara fitur yang tersedia dan kebutuhan aktual institusi. Akibatnya, pengguna terpaksa mencari solusi alternatif atau melakukan penyesuaian manual, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Tantangan teknis juga menjadi faktor penghambat signifikan dalam implementasi e-SAKIP. Operator pelaksana penginput data menyampaikan:

“Kami sering menghadapi masalah seperti sistem yang lambat atau bahkan error. Kadang-kadang, kami harus menginput ulang data karena sistem tiba-tiba logout. Ini sangat menghambat pekerjaan kami dan membuat proses input data menjadi lebih lama dan rawan kesalahan”.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa masalah teknis tidak hanya menghambat efisiensi kerja, tetapi juga berpotensi mempengaruhi akurasi data yang diinput. Ketidakstabilan sistem dapat menyebabkan frustrasi di kalangan pengguna dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap aplikasi.

Kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang memadai juga berkontribusi pada ketidakefektifan penggunaan e-SAKIP. Situasi ini menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan dapat mengakibatkan underutilisasi fitur-fitur aplikasi dan potensi kesalahan dalam penggunaannya. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas sistem tetapi juga dapat menyebabkan resistensi di kalangan pengguna. Masalah akurasi dan reliabilitas data juga menjadi perhatian utama. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sistem verifikasi data yang lebih baik dalam e-SAKIP. Ketidakakuratan data tidak hanya mempengaruhi kualitas pelaporan tetapi juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja secara keseluruhan.

Koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun e-SAKIP dimaksudkan untuk meningkatkan kolaborasi, masih ada kesenjangan dalam koordinasi antar unit yang perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas sistem. Beban kerja yang meningkat juga menjadi keluhan beberapa pengguna. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa transisi ke sistem baru tidak selalu menghasilkan efisiensi yang diharapkan, setidaknya dalam jangka pendek. Peningkatan beban kerja ini dapat mengurangi motivasi pengguna dan mempengaruhi kualitas data yang diinput.

Masalah transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan. Ini menunjukkan bahwa meskipun e-SAKIP bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem dan proses evaluasi yang dihasilkannya. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan berbasis data juga menjadi isu penting. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun e-SAKIP berhasil mengumpulkan data, masih ada kesenjangan dalam kemampuannya untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan fitur analitis dan pelaporan dalam aplikasi.

Faktor resistensi terhadap perubahan juga tidak bisa diabaikan. Seorang pengguna senior menyatakan:

“Banyak dari kami yang sudah terbiasa dengan sistem lama merasa kesulitan beradaptasi dengan e-SAKIP. Interface-nya berbeda, prosesnya berbeda, dan kadang terasa lebih rumit daripada cara lama kami”.

Ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan dapat menjadi hambatan signifikan dalam adopsi dan penggunaan efektif e-SAKIP. Diperlukan strategi manajemen perubahan yang lebih baik untuk mengatasi resistensi ini dan memfasilitasi transisi yang lebih mulus.

Masalah keberlanjutan dan pengembangan aplikasi juga menjadi perhatian. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengungkapkan:

“Kami khawatir tentang bagaimana e-SAKIP akan berkembang di masa depan. Apakah akan ada pembaruan rutin? Bagaimana dengan dukungan jangka panjang? Ini penting untuk memastikan investasi kami dalam sistem ini tidak sia-sia”.

Pernyataan ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas tentang rencana pengembangan jangka panjang e-SAKIP untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap keberlanjutan dan relevansi sistem.

Kesimpulannya, meskipun e-SAKIP memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses monitoring dan evaluasi kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, masih ada berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Mulai dari masalah teknis, kurangnya pelatihan dan dukungan, hingga isu-isu terkait akurasi data dan pengambilan keputusan.

Upaya Peningkatan Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-SAKIP Dalam Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, berikut adalah hasil penelitian mengenai upaya peningkatan efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja:

Peningkatan Kesesuaian Fitur dengan Kebutuhan Spesifik

Salah satu upaya utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesesuaian fitur-fitur e-SAKIP dengan kebutuhan spesifik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyatakan:

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap fitur-fitur yang ada dalam e-SAKIP dan membandingkannya dengan kebutuhan kami. Kami juga aktif memberikan masukan kepada pengembang aplikasi untuk penyesuaian yang diperlukan”.

Upaya ini mencakup identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, pengajuan usulan perbaikan kepada pihak pengembang aplikasi, dan jika memungkinkan, pengembangan modul tambahan yang terintegrasi dengan e-SAKIP untuk memenuhi kebutuhan spesifik institusi.

Peningkatan Infrastruktur dan Dukungan Teknis

Untuk mengatasi kendala teknis, diperlukan peningkatan infrastruktur IT dan penguatan dukungan teknis. Operator pelaksana penginput data mengungkapkan:

“Kami sering mengalami masalah koneksi dan sistem yang lambat. Akan sangat membantu jika ada tim support teknis yang selalu siap membantu ketika terjadi masalah”.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan bandwidth internet, pembaruan hardware yang digunakan untuk mengakses aplikasi, serta pembentukan tim support teknis khusus yang dapat memberikan bantuan cepat ketika terjadi masalah.

Program Pelatihan Komprehensif dan Berkelanjutan

Peningkatan kompetensi pengguna melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penggunaan e-SAKIP. Salah seorang operator menyampaikan:

“Kami membutuhkan pelatihan yang lebih intensif dan regular, tidak hanya saat awal penerapan aplikasi, tapi juga ketika ada pembaruan atau fitur baru”.

Program pelatihan ini harus mencakup tidak hanya aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana data yang diinput berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi kinerja secara keseluruhan.

Peningkatan Akurasi dan Reliabilitas Data

Untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas data, perlu dikembangkan sistem verifikasi dan validasi data yang lebih ketat. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menekankan:

“Akurasi data sangat krusial bagi kami. Kami perlu memastikan bahwa setiap angka yang masuk ke dalam sistem benar-benar mencerminkan kinerja yang sebenarnya”.

Upaya ini dapat meliputi penerapan sistem verifikasi berlapis, di mana data yang diinput harus melalui beberapa tahap pemeriksaan sebelum dianggap valid. Selain itu, dapat juga diterapkan sistem peringatan otomatis untuk data yang tidak konsisten atau mencurigakan.

Peningkatan Koordinasi Antar Pihak

Untuk mengatasi masalah koordinasi, perlu dikembangkan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan:

“Kami perlu membangun komunikasi yang lebih baik antara tim penginput data, tim analisis, dan pengambil keputusan. E-SAKIP seharusnya bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif”.

Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk pembentukan tim koordinasi khusus, penyelenggaraan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan isu-isu terkait penggunaan e-SAKIP, serta pengembangan fitur komunikasi terintegrasi dalam aplikasi.

Optimalisasi Beban Kerja

Untuk mengatasi masalah peningkatan beban kerja, perlu dilakukan optimalisasi proses kerja dan integrasi e-SAKIP dengan sistem yang sudah ada. Salah seorang operator mengungkapkan:

“Kami merasa ada duplikasi pekerjaan karena harus menginput data ke beberapa sistem yang berbeda. Akan sangat membantu jika e-SAKIP bisa terintegrasi dengan sistem lain yang kami gunakan”.

Upaya ini dapat mencakup otomatisasi beberapa proses penginputan data, integrasi e-SAKIP dengan sistem informasi lain yang digunakan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta evaluasi dan penyederhanaan proses kerja yang ada.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlu dikembangkan mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menekankan:

“E-SAKIP seharusnya bisa menjadi alat untuk meningkatkan transparansi. Kami perlu mengembangkan cara agar hasil monitoring dan evaluasi bisa diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pengembangan dashboard kinerja yang mudah dipahami, penerbitan laporan kinerja reguler yang bisa diakses publik, serta pengembangan mekanisme umpan balik dari stakeholder.

Peningkatan Kapabilitas Analisis Data

Untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, perlu dikembangkan fitur analisis data yang lebih canggih dalam e-SAKIP. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan:

“Kami membutuhkan tools analisis yang lebih advanced untuk bisa menginterpretasikan data kinerja dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat”.

Upaya ini dapat mencakup pengembangan fitur visualisasi data, implementasi algoritma analisis prediktif, serta pelatihan khusus bagi pengambil keputusan tentang cara menginterpretasikan dan menggunakan data kinerja.

Manajemen Perubahan yang Efektif

Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, perlu diterapkan strategi manajemen perubahan yang efektif. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengungkapkan:

“Perubahan sistem selalu menimbulkan resistensi. Kami perlu strategi yang tepat untuk membantu semua pihak beradaptasi dengan sistem baru ini”.

Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi sosialisasi intensif tentang manfaat e-SAKIP, pemberian insentif bagi penggunaan efektif aplikasi, serta pendampingan intensif bagi pengguna yang mengalami kesulitan.

Pengembangan Berkelanjutan Aplikasi

Untuk menjamin keberlanjutan dan relevansi e-SAKIP, perlu ada komitmen untuk pengembangan berkelanjutan aplikasi. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menekankan:

“E-SAKIP harus terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan kami. Kami perlu jaminan bahwa aplikasi ini akan terus diperbarui dan ditingkatkan”.

Upaya ini dapat mencakup pembentukan tim pengembangan khusus, penyelenggaraan forum reguler untuk mendiskusikan perbaikan dan pengembangan aplikasi, serta alokasi anggaran khusus untuk pengembangan berkelanjutan e-SAKIP.

Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus

Terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap penggunaan e-SAKIP. Salah seorang operator menyampaikan:

“Kami perlu secara reguler mengevaluasi efektivitas penggunaan e-SAKIP dan melakukan perbaikan yang diperlukan”.

Ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan pengguna secara berkala, analisis log penggunaan aplikasi, serta pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengusulkan solusi.

Kesimpulannya, peningkatan efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Upaya-upaya yang perlu dilakukan mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, proses kerja, serta budaya organisasi. Implementasi upaya-upaya ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat, mulai dari level pimpinan hingga staf pelaksana. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari pihak pengembang aplikasi e-SAKIP untuk dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dengan menerapkan upaya-upaya ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan penggunaan e-SAKIP di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menjadi lebih efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja institusi secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan efektivitas adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan evaluasi dan penyesuaian terus-menerus seiring dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

PEMBAHASAN

Penyebab Tidak Efektifnya Penggunaan Aplikasi e-SAKIP Dan Faktor Penghambatnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terungkap berbagai penyebab dan faktor penghambat yang menyebabkan ketidakefektifan penggunaan aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai temuan-temuan tersebut:

Ketidaksesuaian Fitur dengan Kebutuhan Spesifik Institusi

Salah satu penyebab utama ketidakefektifan penggunaan e-SAKIP adalah adanya kesenjangan antara fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi dengan kebutuhan spesifik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Meskipun e-SAKIP dirancang sebagai solusi komprehensif untuk monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, ternyata masih ada aspek-aspek kunci dari proses kerja di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang belum terakomodasi sepenuhnya. [31] Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mengungkapkan bahwa meskipun e-SAKIP memiliki banyak fitur, masih ada beberapa aspek penting dari proses monitoring dan evaluasi kinerja yang belum tercakup. Akibatnya, para pengguna terpaksa melakukan penyesuaian atau bahkan menggunakan sistem tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Situasi ini jelas mengurangi efisiensi dan efektivitas penggunaan e-SAKIP secara keseluruhan.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan beberapa implikasi serius. Pertama, pengguna harus melakukan pekerjaan tambahan untuk menyesuaikan output dari e-SAKIP dengan kebutuhan pelaporan mereka. Kedua, penggunaan sistem tambahan di luar e-SAKIP dapat menyebabkan duplikasi data dan meningkatkan risiko inkonsistensi informasi. Ketiga, ketidakmampuan e-SAKIP untuk memenuhi semua kebutuhan spesifik institusi dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem dan mengurangi motivasi mereka untuk menggunakannya secara optimal.

Tantangan Teknis dan Infrastruktur

Masalah teknis menjadi faktor penghambat signifikan lainnya dalam implementasi efektif e-SAKIP. Berdasarkan keterangan dari operator pelaksana penginput data, sering terjadi kendala seperti sistem yang lambat, error yang tidak terduga, atau masalah konektivitas. Situasi ini tidak hanya menghambat proses penginputan data tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan data. [32] Operator melaporkan bahwa mereka sering harus menginput ulang data karena sistem tiba-tiba logout atau mengalami error. Hal ini tidak hanya membuang waktu dan energi, tetapi juga meningkatkan frustrasi di kalangan pengguna. Lebih jauh lagi, ketidakstabilan sistem dapat menyebabkan hilangnya data penting atau terciptanya duplikasi data yang tidak perlu.

Masalah infrastruktur IT yang tidak memadai juga berkontribusi pada tantangan teknis ini. Kecepatan internet yang tidak stabil, perangkat keras yang sudah usang, atau kurangnya dukungan teknis yang responsif dapat memperparah masalah-masalah teknis yang dihadapi. Akibatnya, pengguna mungkin enggan untuk mengandalkan e-SAKIP sepenuhnya dan lebih memilih untuk mempertahankan sistem pencatatan manual sebagai backup, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas dan efisiensi penggunaan e-SAKIP.

Kurangnya Pelatihan dan Dukungan Teknis

Faktor penting lainnya yang berkontribusi pada ketidakefektifan penggunaan e-SAKIP adalah kurangnya pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka jarang menerima

pelatihan terkait penggunaan e-SAKIP, terutama ketika ada pembaruan sistem atau penambahan fitur baru.[5] Situasi ini mengakibatkan banyak pengguna tidak dapat memanfaatkan semua fitur yang tersedia dalam e-SAKIP secara maksimal. Mereka mungkin hanya menggunakan fungsi-fungsi dasar yang mereka pahami, sementara fitur-fitur lanjutan yang berpotensi meningkatkan efisiensi kerja tetap tidak tersentuh.

Lebih lanjut, kurangnya pemahaman menyeluruh tentang sistem dapat menyebabkan kesalahan dalam penginputan atau interpretasi data. Selain itu, keterbatasan dukungan teknis yang responsif juga menjadi kendala. Ketika pengguna menghadapi masalah teknis, mereka sering kali harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan, atau bahkan harus mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Hal ini tidak hanya menghambat produktivitas tetapi juga dapat menyebabkan frustrasi dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem.

Masalah Akurasi dan Reliabilitas Data

Akurasi dan reliabilitas data menjadi perhatian utama dalam penggunaan e-SAKIP. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengungkapkan bahwa sering terjadi inkonsistensi antara data yang ada di e-SAKIP dengan catatan manual yang dimiliki institusi. Situasi ini mengharuskan dilakukannya verifikasi berulang kali, yang tentu saja memakan waktu dan sumber daya tambahan. Ketidakakuratan data dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia saat penginputan, keterbatasan dalam proses verifikasi data, atau bahkan masalah pada sistem itu sendiri.

Implikasi dari masalah ini sangat serius, mengingat data dari e-SAKIP digunakan sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan penting. Lebih lanjut, ketidakpercayaan terhadap akurasi data dapat menyebabkan pengguna, terutama di level pengambil keputusan, enggan untuk mengandalkan e-SAKIP sepenuhnya. Mereka mungkin lebih memilih untuk tetap menggunakan metode konvensional atau melakukan verifikasi manual yang ekstensif, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi dan efektivitas penggunaan sistem.

Koordinasi Antar Pihak yang Terlibat

Meskipun e-SAKIP diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengungkapkan bahwa masih sering terjadi ketidakselarasan antara data yang diinput dengan interpretasi yang dilakukan oleh tim analisis.[33] Kesenjangan koordinasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin ada perbedaan pemahaman tentang bagaimana data harus diinterpretasikan atau digunakan. Kedua, kurangnya komunikasi yang efektif antara tim penginput data dan tim analisis dapat menyebabkan kesalahpahaman atau misinterpretasi. Ketiga, mungkin ada keterbatasan dalam fitur kolaborasi yang disediakan oleh e-SAKIP itu sendiri.

Implikasi dari masalah koordinasi ini cukup signifikan. Ketidakselarasan dalam interpretasi data dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat atau evaluasi kinerja yang tidak akurat. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efektif dapat mengurangi kepercayaan antar unit kerja dan menurunkan motivasi untuk menggunakan e-SAKIP secara optimal.

Peningkatan Beban Kerja

Paradoksnya, meskipun e-SAKIP dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, beberapa pengguna melaporkan bahwa implementasinya justru menambah beban kerja mereka. Seorang operator mengungkapkan bahwa mereka harus menginput data ke e-SAKIP sambil tetap mempertahankan sistem pelaporan lama untuk keperluan verifikasi, yang pada dasarnya berarti melakukan pekerjaan ganda.[6]

Peningkatan beban kerja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin ada periode transisi di mana sistem lama dan baru harus dijalankan secara paralel untuk memastikan kontinuitas dan akurasi data. Kedua, kurangnya integrasi antara e-SAKIP dengan sistem informasi lain yang digunakan oleh institusi dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan. Ketiga, kompleksitas e-SAKIP itu sendiri mungkin membutuhkan waktu dan usaha lebih besar dalam proses penginputan dan analisis data. Implikasi dari peningkatan beban kerja ini cukup serius. Selain menurunkan efisiensi, hal ini juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan di kalangan pengguna. Pada gilirannya, situasi ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas data yang diinput atau bahkan resistensi terhadap penggunaan e-SAKIP secara keseluruhan.

Masalah Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun e-SAKIP didesain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja institusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran di kalangan pengguna terkait hal ini. Kepala Sub Bagian

Perencanaan Program dan Anggaran mengungkapkan adanya kekhawatiran tentang bagaimana data dalam e-SAKIP digunakan dan diinterpretasikan, serta bagaimana kinerja dinilai berdasarkan data tersebut.[34]

Kekhawatiran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin ada kurangnya transparansi dalam proses evaluasi kinerja yang dilakukan berdasarkan data e-SAKIP. Kedua, pengguna mungkin merasa tidak memiliki kontrol atau pemahaman yang cukup tentang bagaimana data mereka digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mungkin ada kekhawatiran bahwa e-SAKIP tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi konteks atau situasi khusus yang mungkin mempengaruhi kinerja. Implikasi dari masalah ini cukup signifikan. Kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem dapat menurunkan motivasi pengguna untuk menggunakan e-SAKIP secara optimal. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi efektivitas e-SAKIP sebagai alat untuk meningkatkan kinerja institusi secara keseluruhan.

Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Meskipun e-SAKIP menyediakan banyak data terkait kinerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan dalam penggunaan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang efektif. Panitera mengungkapkan bahwa aplikasi ini kurang memiliki fitur analitis yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, terutama dalam hal perencanaan program dan anggaran.[6] Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin ada kekurangan dalam fitur analisis dan visualisasi data yang disediakan oleh e-SAKIP. Kedua, pengguna mungkin kurang memiliki pemahaman atau pelatihan yang cukup tentang bagaimana menginterpretasikan dan mengaplikasikan data yang tersedia. Ketiga, mungkin ada kesenjangan antara jenis data yang dikumpulkan oleh e-SAKIP dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategis.

Implikasi dari keterbatasan ini cukup serius. Jika e-SAKIP tidak dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif, maka nilainya sebagai alat manajemen kinerja menjadi terbatas. Hal ini dapat menyebabkan pengambil keputusan kembali mengandalkan metode konvensional atau intuisi, yang mungkin kurang akurat atau konsisten.

Resistensi terhadap Perubahan

Faktor penting lainnya yang berkontribusi pada ketidakefektifan penggunaan e-SAKIP adalah resistensi terhadap perubahan di kalangan pengguna. Seorang pengguna senior mengungkapkan bahwa banyak dari mereka yang sudah terbiasa dengan sistem lama merasa kesulitan beradaptasi dengan e-SAKIP, menganggap interface-nya berbeda dan prosesnya lebih rumit.[35] Resistensi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketakutan atau ketidaknyamanan terhadap perubahan, terutama di kalangan pengguna yang sudah lama bekerja dengan sistem lama. Kedua, kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari implementasi e-SAKIP. Ketiga, mungkin ada kekurangan dalam strategi manajemen perubahan yang diterapkan selama proses implementasi.

Implikasi dari resistensi ini cukup signifikan. Pengguna yang resisten mungkin akan enggan untuk menggunakan e-SAKIP secara optimal, memilih untuk tetap menggunakan metode lama atau hanya menggunakan fitur-fitur minimal dari sistem baru. Hal ini dapat mengurangi efektivitas implementasi e-SAKIP secara keseluruhan dan menghambat pencapaian tujuan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Masalah Keberlanjutan dan Pengembangan Aplikasi

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran di kalangan pengguna terkait keberlanjutan dan pengembangan e-SAKIP di masa depan. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana e-SAKIP akan berkembang, apakah akan ada pembaruan rutin, dan bagaimana dengan dukungan jangka panjang. Kekhawatiran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin ada kurangnya komunikasi yang jelas dari pihak pengembang atau manajemen tentang rencana pengembangan jangka panjang e-SAKIP. Kedua, pengguna mungkin memiliki pengalaman sebelumnya dengan sistem yang ditinggalkan atau tidak diperbarui setelah beberapa waktu. Ketiga, mungkin ada kekhawatiran tentang kemampuan e-SAKIP untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau regulasi di masa depan.[36] Implikasi dari masalah ini cukup serius. Kekhawatiran tentang keberlanjutan dapat menyebabkan pengguna enggan untuk berinvestasi waktu dan usaha dalam mempelajari dan mengoptimalkan penggunaan e-SAKIP. Hal ini dapat mengurangi efektivitas implementasi sistem secara keseluruhan dan membatasi potensinya untuk meningkatkan kinerja institusi dalam jangka Panjang.

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hargani, Murwaningsih dan Akbarini yang memaparkan hasil yakni Faktor-faktor yang menyebabkan hasil penilaian SAKIP di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum optimal meliputi kurangnya pemahaman pegawai tentang SAKIP, kurangnya komitmen dari perangkat daerah, serta ketidakadaan sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi. Untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah

melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan coaching clinic dan pelatihan SAKIP, membangun budaya kinerja, serta menindaklanjuti rekomendasi terkait pembuatan aplikasi [37].

Upaya Peningkatan Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-SAKIP Dalam Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai upaya-upaya tersebut:

Peningkatan Kesesuaian Fitur dengan Kebutuhan Spesifik Institusi

Salah satu upaya utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesesuaian fitur-fitur e-SAKIP dengan kebutuhan spesifik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyatakan bahwa mereka terus melakukan evaluasi terhadap fitur-fitur yang ada dalam e-SAKIP dan membandingkannya dengan kebutuhan mereka. Mereka juga aktif memberikan masukan kepada pengembang aplikasi untuk penyesuaian yang diperlukan.

Upaya peningkatan efektivitas e-SAKIP di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret: melakukan analisis kesenjangan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, menyusun daftar prioritas pengembangan fitur berdasarkan hasil analisis, membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan pengembang aplikasi, dan mempertimbangkan pengembangan modul tambahan yang terintegrasi dengan e-SAKIP untuk memenuhi kebutuhan spesifik institusi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem e-SAKIP dapat memenuhi kebutuhan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara optimal dan meningkatkan efektivitas kinerja institusi.[38]

Peningkatan Infrastruktur dan Dukungan Teknis

Untuk mengatasi kendala teknis yang sering dihadapi, diperlukan peningkatan infrastruktur IT dan penguatan dukungan teknis. Operator pelaksana penginput data mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami masalah koneksi dan sistem yang lambat. Mereka menekankan pentingnya tim support teknis yang selalu siap membantu ketika terjadi masalah.

Upaya peningkatan infrastruktur di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dilakukan melalui beberapa langkah: melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur IT yang ada, meningkatkan bandwidth internet dan memperbarui hardware untuk mengakses e-SAKIP, membentuk tim support teknis khusus dengan pengetahuan mendalam tentang sistem, serta mengembangkan sistem pemantauan real-time terhadap kinerja e-SAKIP dan infrastruktur pendukungnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi masalah kecepatan dan stabilitas sistem, memberikan bantuan cepat saat terjadi masalah, serta mendeteksi dan mengatasi masalah potensial sebelum berdampak pada pengguna.[39]

Program Pelatihan Komprehensif dan Berkelanjutan

Peningkatan kompetensi pengguna melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penggunaan e-SAKIP. Salah seorang operator menyampaikan bahwa mereka membutuhkan pelatihan yang lebih intensif dan regular, tidak hanya saat awal penerapan aplikasi, tapi juga ketika ada pembaruan atau fitur baru.[31]

Upaya peningkatan kapasitas pengguna e-SAKIP dapat dilakukan melalui beberapa langkah: penyusunan kurikulum pelatihan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, pelaksanaan pelatihan berkala termasuk sesi penyegaran dan pelatihan khusus untuk pembaruan fitur, penggunaan metode pelatihan bervariasi seperti tatap muka, workshop, tutorial online, dan e-learning, serta pengembangan sistem evaluasi efektivitas pelatihan melalui tes, survei, dan pemantauan performa pengguna. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan pemahaman menyeluruh tentang penggunaan e-SAKIP dan kaitannya dengan proses monitoring dan evaluasi kinerja. **Peningkatan Akurasi dan Reliabilitas Data**

Untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas data, perlu dikembangkan sistem verifikasi dan validasi data yang lebih ketat. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menekankan bahwa akurasi data sangat krusial dan perlu dipastikan bahwa setiap angka yang masuk ke dalam sistem benar-benar mencerminkan kinerja yang sebenarnya.

Upaya meningkatkan akurasi data e-SAKIP dapat dilakukan melalui beberapa langkah: menerapkan sistem verifikasi berlapis dengan pemeriksaan bertahap, mengimplementasikan sistem peringatan otomatis untuk data yang

mencurigakan, mengembangkan prosedur rekonsiliasi data regular dengan sistem pencatatan lain, serta mengadakan audit data berkala oleh pihak independen. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan integritas data, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam proses pengumpulan dan verifikasi data di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.[35]

Peningkatan Koordinasi Antar Pihak

Untuk mengatasi masalah koordinasi, perlu dikembangkan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan perlunya membangun komunikasi yang lebih baik antara tim penginput data, tim analisis, dan pengambil keputusan.[40]

Upaya meningkatkan koordinasi dalam penggunaan e-SAKIP dapat dilakukan melalui beberapa langkah: pembentukan tim koordinasi khusus, penyelenggaraan pertemuan rutin, pengembangan dashboard kinerja terintegrasi, dan integrasi fitur komunikasi dalam e-SAKIP. Tim koordinasi akan memastikan aliran informasi yang lancar, pertemuan rutin akan membahas perkembangan dan isu-isu terkait, dashboard kinerja akan memberikan gambaran real-time tentang status kinerja, sementara fitur komunikasi terintegrasi akan memfasilitasi kolaborasi antar pihak dalam menganalisis dan menginterpretasikan data.[41]

Optimalisasi Beban Kerja

Untuk mengatasi masalah peningkatan beban kerja, perlu dilakukan optimalisasi proses kerja dan integrasi e-SAKIP dengan sistem yang sudah ada. Salah seorang operator mengungkapkan bahwa mereka merasa ada duplikasi pekerjaan karena harus menginput data ke beberapa sistem yang berbeda.[42]

Upaya meningkatkan efisiensi penggunaan e-SAKIP di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dilakukan melalui beberapa langkah: analisis proses bisnis menyeluruh untuk mengidentifikasi area inefisiensi, integrasi e-SAKIP dengan sistem informasi lain untuk mengurangi duplikasi input data, otomatisasi proses penginputan data untuk mengurangi input manual, serta evaluasi dan penyederhanaan proses kerja yang melibatkan eliminasi langkah tidak perlu, konsolidasi tugas tumpang tindih, dan redistribusi tanggung jawab untuk meratakan beban kerja. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan e-SAKIP dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perlu dikembangkan mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses.[43] Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menekankan bahwa e-SAKIP seharusnya bisa menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan mereka perlu mengembangkan cara agar hasil monitoring dan evaluasi bisa diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui beberapa langkah: mengembangkan dashboard kinerja yang mudah dipahami dan diakses, menerbitkan laporan kinerja regular untuk publik, membangun mekanisme umpan balik dari stakeholder seperti sistem komentar terintegrasi atau survei kepuasan, serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan data e-SAKIP dengan mempublikasikan kriteria evaluasi, metodologi analisis, dan penggunaan hasil analisis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja secara komprehensif namun mudah dipahami, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Peningkatan Kapabilitas Analisis Data

Untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, perlu dikembangkan fitur analisis data yang lebih canggih dalam e-SAKIP. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa mereka membutuhkan tools analisis yang lebih advanced untuk bisa menginterpretasikan data kinerja dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat.

Upaya peningkatan kemampuan analitik e-SAKIP dapat dilakukan melalui beberapa langkah: pengembangan fitur visualisasi data yang lebih canggih seperti grafik interaktif dan heat maps, implementasi algoritma analisis prediktif untuk membuat proyeksi berdasarkan data yang ada, penyelenggaraan pelatihan khusus bagi pengambil keputusan tentang interpretasi dan penggunaan data kinerja untuk keputusan strategis, serta integrasi e-SAKIP dengan tools business intelligence eksternal untuk memberikan fleksibilitas dan kemampuan analisis yang lebih besar bagi pengguna.[44]

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gitasih, Sumada dan Astawa yang memaparkan hasil yakni Aplikasi e-SAKIP memberikan dampak signifikan terhadap kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Badung. Namun, hasil analisis uji bootstrapping menunjukkan bahwa variabel

aplikasi e-SAKIP memiliki nilai terendah pada aspek pemahaman dan penggunaan aplikasi yang aktif oleh semua pengelola akuntabilitas di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan penggunaan aplikasi secara aktif [6].

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, penggunaan aplikasi e-SAKIP menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan ketidakefektifan implementasinya. Faktor-faktor utama meliputi ketidaksesuaian fitur dengan kebutuhan spesifik institusi, masalah teknis dan infrastruktur, kurangnya pelatihan dan dukungan teknis, masalah akurasi dan reliabilitas data, kesulitan koordinasi antar pihak, peningkatan beban kerja, kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan dalam pengambilan keputusan berbasis data, resistensi terhadap perubahan, serta kekhawatiran tentang keberlanjutan dan pengembangan aplikasi. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan penurunan efisiensi, frustrasi pengguna, ketidakpercayaan terhadap sistem, dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan peningkatan kinerja yang diharapkan dari implementasi e-SAKIP.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diperlukan serangkaian upaya komprehensif. Ini meliputi peningkatan kesesuaian fitur dengan kebutuhan spesifik institusi, perbaikan infrastruktur dan dukungan teknis, implementasi program pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan akurasi dan reliabilitas data, penguatan koordinasi antar pihak, optimalisasi beban kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengembangan kapabilitas analisis data, penerapan manajemen perubahan yang efektif, serta komitmen untuk pengembangan berkelanjutan aplikasi. Upaya-upaya ini mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, proses kerja, dan budaya organisasi, yang membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait serta dukungan dari pengembang aplikasi. Dengan implementasi konsisten dari langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan e-SAKIP dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kinerja institusi secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti telah menyajikan hasil penelitiannya dan mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk menyimak. Dengan rendah hati, peneliti mengundang masukan berupa kritik dan saran konstruktif guna meningkatkan kualitas karya ilmiah di masa depan. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam kelancaran penyusunan karya ilmiah ini. Paragraf penutup ini mencerminkan sikap profesional peneliti yang terbuka terhadap evaluasi dan pengembangan diri, serta menunjukkan rasa terima kasih atas dukungan yang diterima selama proses penelitian berlangsung.

REFERENSI

- [1] L. Muliawaty and S. Hendryawan, "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)," *Kebijak. J. Ilmu Adm.*, vol. 11, no. 2, 2020.
- [2] B. W. O. P. Sauwir, *Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*. IPDN, 2023.
- [3] Y. K. Dwivedi *et al.*, "Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions," *Int. J. Inf. Manage.*, vol. 59, p. 102168, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168.
- [4] Mutinda Teguh Widayanto, Yuliana, Ismawati, and Nurdin Natan, "Implementation Of Performance Assessment To Determine Employee Performance," *Int. J. Sci. Technol. Manag.*, vol. 2, no. 5, pp. 1582–1587, Sep. 2021, doi: 10.46729/ijstm.v2i5.302.
- [5] I. Febiani, G. Irianto, and L. Purwanti, "Determinan Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)," *J. Reviu Akunt. dan Keuang.*, vol. 6, no. 1, Dec. 2017, doi: 10.22219/jrak.v6i1.5079.
- [6] N. K. Y. Gitasih, I. M. Sumada, and I. W. Astawa, "Pengaruh E-Sakip Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung," *J. Rev. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 6, no. 4, 2023.
- [7] Risnawati, Satriadi, Selvi Fauzar, Hasnarika, and Rapida Nuriana, "Organizational Performance Achievements at The Tanjungpinang City District Office," *J. Ekon. dan Bisnis Digit.*, vol. 1, no. 2, pp. 101–110, Apr. 2022, doi: 10.55927/ministal.v1i2.289.
- [8] Y. K. Dwivedi *et al.*, "Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions," *Int. J. Inf. Manage.*, no. July, p. 102168, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168.
- [9] N. R. F. Tuheteru, A. Musfitria, and E. Yuliawan, "Analisis Efektivitas pada Pengelolaan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah di MI At-Taqwa Cijeruk," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 3, no. 3, 2022, doi: 1047467/elmal.v5i3.900.
- [10] A. Fardiansyah, D. H. Syurandhari, A. M. Yuniarti, M. H. Saputra, and E. Mafticha, *Konsep Dasar Manajemen Kesehatan*. Mojokerto: STIKes Majapahit Mojokerto, 2022.
- [11] N. T. Saputro and A. E. Pradana, *Monitoring Pelayanan Rekam Medis*. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, 2022.
- [12] I. L., "EVALUASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN," *Adaara J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 920–935, Aug. 2019, doi: 10.35673/ajmpi.v9i2.427.
- [13] H. Faza and Mukaram, "Analisis Efektifitas Sistem Performance Appraisal Pada Pt Patra Badak Arun Solusi," *Appl. Bus. Adm. J.*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.62201/abaj.v2i1.37>.
- [14] E. Lase and H. Lase, "Implementasi Sistem Monitoring dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Spmdp2a Kabupaten Nias," *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 5, no. 4, 2024, doi: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>.
- [15] E. Setyanto, R. taufik Hidayat, and I. A. Diyah, *Manajemen Organisasi*. Banjar: Ruang KARYA, 2024.
- [16] R. M. Susanti, "Pengukuran Kinerja Organisasi," *EEJ Ekasakti Educ. J.*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.31933/eej.v1i2.473>.
- [17] P. L. T. Sihombing and M. U. Batoebara, "Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaandi Cv Multi Baja Medan," *J. Publik Reform J. Amin. Publik*, vol. 6, 2019, doi: <https://doi.org/10.46576/jpr.v6i0.1241>.
- [18] E. I. Supriyadi, "Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik," *J. RASI*, vol. 3, no. 1, Apr. 2021, doi: 10.52496/rasi.v3i1.117.
- [19] E. E. Sala and A. P. Subriadi, "Hot-Fit Model to Measure the Effectiveness and Efficiency of Information System in Public Sector," *The Winners*, vol. 23, no. 2, pp. 131–141, May 2023, doi: 10.21512/tw.v23i2.7423.
- [20] D. Mulyadi and A. Choliq, "Penerapan Metode Human Organization Technology (HOT-Fit Model) untuk Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Persediaan (SIDIA) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor," *Teknois J. Ilm. Teknol. Inf. dan Sains*, vol. 7, no. 2, pp. 1–12, Aug. 2019, doi: 10.36350/jbs.v7i2.23.
- [21] Tawar, A. F. Santoso, and Y. S. Salma, "Model HOT FIT dalam Manajemen Sistem Informasi," *Bincang Sains dan Teknol.*, vol. 1, no. 02, pp. 76–82, Dec. 2022, doi: 10.56741/bst.v1i02.144.
- [22] D. Soelistya, R. P. Setyaningrum, N. Aisyah, S. H. Sahir, and T. Purwati, *Budaya Organisasi dalam Praktik*.

- Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2022.
- [23] Khaeruman and Tabroni, "Strategi Efektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Bisnis Modern," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 3, no. 2, 2024, doi: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.2789>.
- [24] U. Rusilowati, *Perencanaan Sumber Daya Manusia: Meraih Kesuksesan Melalui SDM Yang Unggul*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023.
- [25] Y. Lilistian, "Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi, Dan Ketepatan Penempatan Karyawan," *FOKUS Publ. Ilm. untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Univ. Kapuas Sintang*, vol. 20, no. 1, Apr. 2022, doi: [10.51826/fokus.v20i1.596](https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.596).
- [26] R. Abadiyah and I. A. Maufuzah, "Kepemimpinan Transformasional, Beban Kerja, Dan Motivasi Berwirausaha Dalam Meningkatkan Komitmen Organisasi Pada IKM Tas Di Tanggulangin," *J. Ilm. Manaj. dan Bisnis*, vol. 1, no. 3, pp. 281–294, Nov. 2022, doi: [10.24034/jimbis.v1i3.5378](https://doi.org/10.24034/jimbis.v1i3.5378).
- [27] A. Maulana, "Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Jasa," *Coopetition J. Ilm. Manaj.*, vol. 13, no. 2, pp. 345–352, Aug. 2022, doi: [10.32670/coopetition.v13i2.2219](https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.2219).
- [28] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- [29] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," *Bandung CV. Alf.*, 2019.
- [30] S. Hermawan and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2016.
- [31] D. K. Hakim, "Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Elektronik kepada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Banjarnegara," *J. Pengabd. Tek. dan Sains*, vol. 4, no. 1, Jan. 2024, doi: [10.30595/jpts.v4i1.21307](https://doi.org/10.30595/jpts.v4i1.21307).
- [32] F. A. Wibowo, "Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo," *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 11, no. 1, Jun. 2022, doi: [10.33061/jp.v11i1.6137](https://doi.org/10.33061/jp.v11i1.6137).
- [33] S. H. P. Jauhari and D. Rosdini, "Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung Guna Mewujudkan Good Governance," *Musytari Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekon.*, vol. 6, no. 4, 2024, doi: <https://doi.org/10.8734/musytari.v6i4.4278>.
- [34] E. L. Raharja, L. M. Baga, and A. F. Falatehan, "Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor," *J. Manaj. Pembang. Drh.*, vol. 10, no. 2, Oct. 2019, doi: [10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27787](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27787).
- [35] N. A. Marjan, A. A. Supianto, and L. Fanani, "Perancangan User Experience Aplikasi E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menggunakan metode Human-Centered Design (Studi Kasus: Kabupaten Kepulauan Selayar)," *J. Pengemb. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.*, vol. 5, no. 10, 2021.
- [36] J. Gani, "Pengaruh Hambatan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Midtown Surabaya," *J. E-Komunikasi*, vol. 2, no. 1, 2014.
- [37] N. Hargani, T. Murwaningsih, and N. R. Akbarini, "Faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo," *JIKAP (Jurnal Inf. dan Komun. Adm. Perkantoran)*, vol. 7, no. 4, p. 291, Aug. 2023, doi: [10.20961/jikap.v7i4.64455](https://doi.org/10.20961/jikap.v7i4.64455).
- [38] S. M. Devi and M. R. Basyar, "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya Studi Kasus: RSUD Dr. Mohamad Soewandhie," *Birokrasi J. Ilmu Huk. dan Tata Negara*, vol. 2, no. 2, 2024, doi: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>.
- [39] E. Indrayani, *e-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. Solok: LPP Balai Insan Cendekia, 2020.
- [40] S. M. Harahap, J. W. S. Rizki, and E. Z. Siregar, *Strategi Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- [41] A. I. Febriani, Hasanuddin, and M. Saeri, "Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak Tahun 2022," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12850>.
- [42] M. E. A. Kusuma and B. Wardoyo, "Analisis Beban Kerja Sebagai Upaya Implementasi Strategi Peningkatan Produktifitas," *Co-Value J. Ekon. Kop. dan kewirausahaan*, vol. 14, no. 8, 2024, doi: <https://doi.org/10.30605/covalue.v14i8.12345>.

- <https://doi.org/10.36418/covalue.v14i8.4139>.
- [43] I. Rosidah, Gunardi, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka, “Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey),” *J. Ekon. Manaj. Bisnis Dan Akunt. EMBA*, vol. 2, no. 1, pp. 137–156, Sep. 2023, doi: 10.59820/emba.v2i1.110.
- [44] A. Mahendra, “Visualisasi Data Untuk Pemantauan Kinerja Proyek: Teknik Dan Tools,” *J. Teknol. Pint.*, vol. 4, no. 5, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.